

HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN DAN BUDAYA

TERHADAP AKSI PREMANISME

(Dalam Sorotan Syari'at Islam)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI.)
Pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ILHAM

NIM: 10300106029

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN

MAKASSAR

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan dan gelar yang diperoleh karenanya, **batal demi hukum.**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Ilham**, NIM: 10300106029, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN DAN BUDAYA TERHADAP AKSI PREMANISME (Dalam Sorotan Syariat Islam)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 25 Juli 2010.

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Drs. Hamzah Hasan, M.HI
NIP. 19631231 199302 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN DAN BUDAYA TERHADAP AKSI PREMANISME (*dalam sorotan syariat islam*)”, yang disusun oleh **Ilham**, NIM 10300106029, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, tanggal bertepatan dengan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum , Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, _____ 2010 M.
1429 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Drs. Hamzah Hasan, M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Achmad Abu Bakar, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Subhan Khalik, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Hamzah Hasan, M.HI.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.,
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauiddin Makassar. Shalawat dan salam ke hadirat “yang terkasih” Muhammad saw. kepada keluarganya yang suci, serta sahabat-sahabatnya yang terpilih.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal tersebut merupakan wujud dari keterbatasan dan kekhilafaan penulis yang secara maksimal telah berusaha berbuat sebaik mungkin. Namun, perlu dimaklumi bahwa semua ini adalah untuk sampai pada kematangan *intellectual-question* dan *emotional-question* menuju pada penyelaman *spiritual-question*. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran dan keridaan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai sebuah tradisi yang harus dibudayakan.

Proses penyelesaian studi kami adalah anugerah yang tak ternilai berkat peran, andil, dan spirit yang besar dan begitu berarti dari berbagai pihak. Maka, sepatutnyalah, jika penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut serta memberikan sumbangsinya terutama kepada:

1. Yang terkhusus penulis haturkan rasa hormat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (H.Borahima dan Hj.Ruqiyyah) yang telah dengan sabar mengasuh dan mendidik kami, hingga mampu sampai pada jenjang ini. Saudara-saudari penulis yang tercinta (Saenal, Bi'dong, Sarpiah, Alma. Nasriah, Kasman, Kaslim) yang tak henti-hentinya memberikan *support* baik berupa materi maupun spirit sehingga tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Azhar Arsyad, M.A., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, beserta para pembantu dekan.
4. Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI., sebagai ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si sebagai sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Prof. DR. Ambo Asse, M.Ag., selaku pembimbing I dan Drs. Hamzah Hasan, M.HI. selaku pembimbing II, yang telah dengan bijaksana memberikan bimbingan dan arahan serta kesempatan untuk konsultasi, yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. DR. Irfan Idris, M.Ag sebagai dosen dan sebagai kakanda yang selalu memberikan bimbingannya dan arahnnya, lebih-lebih bantuan dalam bentuk penyediaan buku-buku referensi sehingga skripsi ini bisa selesai.

8. Segenap dosen, asisten dosen, serta segenap civitas akademika UIN Alauddin Makassar.
9. Special buat sahabat seperjuanganku di Forum 27 (F-27) ada Desi, Wana, Sube, Jem's, Asri, Opick, Wahyu, ilam (myself). Sebagai sarana perkumpulan belajar, yang berperan aktif untuk selalu saling memotivasi diri dari setiap tugas kuliah.
10. Semua teman-teman satu jurusan, seperjuangan dan sependudukan HPK I, HPK II, dan HPK III. Yang tidak sempat saya sebutkan semua namanya.
11. Kepada teman-teman penulis yang menjadi inspirasi dalam bekerja. Antara lain: Hayyul, Ahmed el-Hosen, Syarif el-Idris (*the tarax*), Muh. Yunan, Naguib el-Hosen, Awal Noer, Safaruddin (*the laba*), Syaqqib Arsalam(*the lappio*) yang terus setia mendukung, membantu dan memberikan arahan langkah penulis dari awal hingga akhir penyelesaian ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah lama terjalin dapat begitu seterusnya
12. Dan tak lupa juga keluarga yang senantiasa memberikan semangat belajar. Diantaranya, Diman el-Abdoel, Kasim el-Kaco, Yusuf to Makaka', Jeilani dng-Parinding, Amud el-Any, Syahrul Medzikki-dzking, Jibdin Makkarama, Shanty Sweet, dan semua kemenakan (*nephew-niece*), yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-persatu yang selalu membuat aku sersenyum dikala aku mengingat atau merindukan mereka.

Tanpa bantuan pihak-pihak yang kami sebutkan di atas, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermamfaat dan hanya kepada allah semua kembali. Kebenaran yang ada dalam tulisan ini semata-mata anugerah dari secuil percikan ilmu-Nya yang tiada bandingannya, semoga Allah swt. Senantiasa meridhoi semua amal usaha yang telah kita lakukan dengan baik dan penuh keagungan serta keikhlasan karena Allah swt. Yang telah merahmati dan meridhoi kita semua. Amin ya... rabbal Alamin.



Makassar, 25 juli 2010
Penulis

Ilham
NIM. 10300106029

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK.....	XII
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Hipotesis.....	8
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
 BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PREMANISME	
A. Pengertian Premanisme.....	16
B. Jenis-jenis premanisme.....	18
C. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Premanisme.....	27
 BAB III PREMANISME DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	

A. Premanisme Ditinjau dari Hukum Positif.....	32
B. Premanisme Ditinjau dari Hukum Islam.....	43

BAB IV HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN DAN BUDAYA TERHADAP

AKSI PREMANISME

A. Pengaruh Kemiskinan dan Budaya Terhadap Aksi Premanisme.....	55
B. Langkah-langkah Dalam Pemberantasan Tindak Premanisme.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------



ABSTRAK

Nama : ILHAM
Nim : 10300106029
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Manuruki VIII
Judul Skripsi : Hubungan Antara Kemiskinan dan Kultur Terhadap Aksi Premanisme (*Dalam Sorotan Syariat Islam*).

Skripsi ini membahas tentang Hubungan Antara Kemiskinan dan Budaya Terhadap Aksi Premanisme Dalam Sorotan Syariat Islam, maka penulis dapat menarik dua sub masalah, yaitu: *pertama* Bagaimana pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme. *kedua* Bagaimana langkah-langkah dalam pemberantasan tindak premanisme.

Untuk membahas permasalahan ini penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dari data yang diperoleh, maka dipahami bahwa Pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap terjadinya aksi premanisme itu sangat besar, Penyebab utama seseorang menjadi seorang preman adalah faktor ekonomi dan sosial, terutama berkaitan upaya mereka bertahan hidup. Dan juga terjadinya tindakan premanisme di pengaruhi oleh budaya atau lingkungan hidup, misalnya Faktor subjektif merupakan faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir). Dan Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan).

Sudah menjadi kenyataan, bahwa semakin maju suatu negara semakin banyak pula muncul bentuk-bentuk kejahatan di negara tersebut. Kemajuan teknologi yang membawa kemajuan transportasi dan komunikasi mendukung terlaksananya kejahatan-kejahatan yang canggih pula. Sehingga Dalam skripsi ini diungkapkan juga Langkah-langkah dalam pemberantasan tindak premanisme, yaitu dengan membuat sebuah stabilitas ekonomi yang kuat, sehingga Negara bisa menjamin kemakmuran rakyatnya, di samping penegakan hukum yang tegas, konsisten dan menegakkan keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana tertuan dalam sila kedua pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pemberantasan premanisme, pemerintah dan masyarakat harus kerjasama. Menegakan keamanan dan kedamaian merupakan Tugas semua manusia, warga negara. Aparat sebagai instrumen negara yang resmi untuk menjamin ketenteraman diberikan otoritas bagi penegakannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu dan teknologi terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kehidupan manusia. Pola kehidupan pun semakin bergeser pada pola yang semakin universal. Suatu permasalahan yang sering muncul dimasyarakat adalah berkisar pada permasalahan remaja, pendidikan, dan pergaulan masyarakat. Di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok, permasalahan seperti itu merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan bila menginginkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan tentram. Bila melihat pergaulan remaja di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok, kita merasakan kekhawatiran dan kengerian yang luar biasa, terutama bila kita melihat sekumpulan remaja berseragam sekolah di pusat-pusat keramaian yang tidak jelas tujuannya.

Kehidupan saat ini sering dihadapkan pada berbagai masalah yang amat kompleks yang tentunya sangat perlu mendapat perhatian. Salah satu masalah tersebut adalah semakin menurunnya tatakrma kehidupan sosial dan etika moral dalam praktek kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya, yang mengakibatkan timbulnya sejumlah efek negatif di masyarakat yang akhir-akhir ini semakin merisaukan. Efek tersebut, misalnya, semakin maraknya penyimpangan di

berbagai norma kehidupan, baik agama maupun sosial, yang terwujud dalam bentuk-bentuk perilaku antisosial seperti tawuran, pencurian, pembunuhan penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, serta perbuatan amoral lainnya.

Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus pada tindakan preman atau kriminal.

Situasi dan kondisi lingkungan masyarakat kita, jika dilihat saat ini sangat rentan bagi tumbuhnya perilaku agresif dan penyimpangan dikalangan remaja, bukan hanya itu kalau kita mencoba melihat lebih jauh lagi ternyata bukan hanya dikalangan remaja saja, akan tetapi perilaku-perilaku agresif dan penyimpangan juga sudah merambat ke pejabat-pejabat. Hampir setiap hari kita saksikan dalam realitas sosial perilaku yang menyimpang.

Pada dasarnya bahwa negara kita adalah negara hukum yang seharusnya mampu memberikan dan menciptakan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat merupakan basis utama lahirnya masyarakat bermoral, dan keperkasaan bangsa dalam membela negara merupakan pondasi keamanan dan ketentraman masyarakat, sebaliknya, ketika masyarakat menjadi sakit orang-orang yang sakitlah yang diuntungkan. Sehingga lahirlah sebuah adagium “ *jika lurus menjadi kurus, dan jika jujur menjadi terbujur*”. Indonesia pada masa Orba, telah memberi pelajaran, betapa perilaku abnormal sebagian aparat birokrasi dan pengusaha melahirkan

mereka yang bergelimang materi, sementara ruang gerak kaum idealis dan kritikus dibungkus habis-habisan. Birokrat negara hidup nyaris berada pada ruang tanpa kritik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalelah. Gejala penomenal yang distortif itu terus tumbuh sampai sekarang dimana negara kita terkorup di Asia, perilaku birokrasinya terburuk, partai politik terbanya, dan gejala buruk lainnya.¹

Seyogianya apabila ingin meneliti tentang ‘limbah masyarakat’ yang dihasilkannya, perlu diteliti pula masyarakat macam apa yang telah memproduksi ‘limbah’ tersebut. Bahan baku apa yang telah diolah oleh masyarakat? Dan bagaimana mekanisme proses pengolahannya? Apakah sudah memenuhi segala prosedur yang telah digariskan atau terjadi penyimpangan, misalnya tidak memiliki persyaratan analisis dampak lingkungan atau tidak peduli pada aturan yang berlaku karena merasa segalanya dapat diatur? Kondisi itu akan mudah mengundang berbagai bentuk patologi sosial. Masyarakat yang sakit karena mengkonsumsi menu makanan dan sanitasi lingkungan yang buruk akan menghasilkan produk yang penuh dengan bibit penyakit, yang pada gilirannya akan merusak metabolisme pencernaan masyarakat itu sendiri. Dari metabolisme pencernaan masyarakat yang sakit sudah dapat dipastikan akan menghasilkan aneka ‘limbah’ masyarakat yang berbahaya. Bahkan dapat menjadi faktor kriminogen bagi kausa terjadinya kejahatan.²

¹Sudarman Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 66.

²Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum dan Ham* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 4.

Era reformasi ini menjadi ladang yang sangat subur bagi perubahan cepat di berbagai sektor kehidupan. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif karena memang diharapkan oleh masyarakat. Namun ada pula yang bersifat merusak bahkan sangat meresahkan masyarakat. Buah yang tidak diharapkan oleh masyarakat adalah lahirnya berbagai bentuk kejahatan, yang sebelum reformasi tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam negara yang berfalsafah Pancasila ini merasa dirinya sebagai bangsa yang ramah tamah, penuh cinta kasih, berubah menjadi makhluk yang oleh Emile Durkheim disebut sebagai makhluk yang amoral, dan oleh Thomas Hobbes dinamakan *homo homini lupus*! Beringas, kasar dan amat mudah tersinggung. Beberapa bentuk dampak negatif dari perubahan yang cepat dalam era reformasi, misalnya tindakan-tindakan premanisme.³

Aksi premanisme yang sering terjadi di masyarakat itu karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pengangguran karena sulitnya lapangan kerja, dan faktor budaya atau lingkungan. Ini terjadi bukan hanya di kota-kota besar akan tetapi juga di daerah-daerah. Misalnya di daerah Pasangkayu (Mamuju Utara), sering terjadi perampokan, dan pemalakan itu karena faktor ekonomi demi untuk mempertahankan hidup.

Bentuk perilaku tersebut, merupakan anak kandung yang lahir dari rahim masyarakat itu sendiri. Dari sudut kriminologi yang merupakan sebuah disiplin ilmu

³*Ibid.*, h.14.

yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial seluas-luasnya deretan bentuk perilaku tersebut memiliki dimensi patologi sosial (penyakit masyarakat), sebagaimana dinyatakan oleh W.A. Boger (1950). Dalam kata “seluas-luasnya” termasuk dalam patologi sosial. Selain bersifat sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial. Dalam literatur, pengertian “penyakit masyarakat” adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertentangan, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Ada pun yang disebut “masalah sosial” adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.⁴

Akhir-akhir ini tindakan-tindakan yang semakin berkembang yang semakin memperjelas keterpurukannya moralitas di negeri ini adalah merajalelanya premanisme yang membuat banyak orang putus asa, seolah tidak lagi bisa diberantas, karena semakin besarnya komunitas mereka, apalagi mereka itu didukung oleh aparat keamanan yang semestinya menjaga keamanan masyarakat. Premanisme merupakan fenomena yang sangat besar dan kasat mata, tidak mungkin aparat keamanan tidak mengetahui keberadaan dan ulah mereka. Tetapi mereka bisa beroperasi dengan

⁴*Ibid.*, h. 15.

leluasa, itu tidak lain karena dibiarkan bahkan dipelihara sebagai mesin pencari uang ilegal.⁵

Ironisnya preman saat ini tidak hanya terdiri dari anak jalanan, tetapi ada juga preman berseragam, preman berdasi, bahkan belakangan dikenal adanya preman berjubah. Padahal setiap preman selalu mengganggu keamanan dan merugikan masyarakat, maupun secara kasar maupun secara lebih halus. karena itu wajar kalau masyarakat mengeluhkan keadaan itu karena keamanan masyarakat benar-benar terganggu dengan maraknya premanisme di negeri ini yang katanya sudah memiliki perangkat hukum ini.

Dari pelacakan literatur dan kenyataan empirik bahwa umat Islam tampaknya perlu melibatkan diri dalam memikirkan berbagai alternatif bagi perbaikan kondisi bangsa yang terus mengalami keterpurukan, sebagai akibat dari lemahnya pemerintahan dan kurangnya penegakan hukum atas berbagai kasus moral yang melanda para remaja dan masyarakat pada umumnya bahkan para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara.⁶

Umat Islam percaya, bahwa ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan ajaran yang terlengkap dan sempurna mengatur segala urusan kehidupan umat manusia. Dan untuk memperbaiki bangsa ini seharusnya

⁵<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=117766>

⁶Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khilafah Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 8.

digunakan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada ajaran Islam sebagai konsekuensi dari penerimaan demokrasi tidak harus dalam bentuknya yang legal-formal, yang penting terjadi transpormasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pandangan umat islam bahwa Islam merupakan agama yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan, ia tidak hanya menyangkut masalah shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi islam juga mencakup seluruh aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.⁷

Negara kita adalah negara hukum yang pemeluknya adalah mayoritas islam harus mampu menjadikan Al-Qur'an dan sunnah nabi sebagai pedoman hidup, Umat Islam yang telah dianugerahkan Tuhan suatu kitab suci Al-Qur'an yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi segala aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan mereka adalah bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan kepada Al-Qur'an.

Nabi Muhammad sebagai pendidik pertama, pada masa awal pertumbuhan Islam, telah menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam disamping sunnah beliau sendiri.⁸

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pokok pendidikan islam dapat dipahami dari Al-Qur'an itu sendiri.

⁷*Ibid*, h. 9.

⁸Aat Syafaat Sohari Sahrani Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Kenakalan Remaja* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 19.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah (16): 64. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya :

Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah; “ Apakah ada hubungan antara kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme dalam sorotan syari'at Islam ?

Adapun sub masalah yang akan dikaji lebih mendalam dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme ?
2. Bagaimana langkah-langkah dalam pemberantasan tindak premanisme ?

C. Hipotesis

⁹Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lintas Media, 2002), h. 373.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis akan memberikan jawaban sementara atas sub pokok permasalahan yang akan dibahas kemudian.

1. Pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme itu sangat besar
Penyebab utama seseorang menjadi seorang preman adalah faktor ekonomi dan sosial, terutama berkaitan upaya mereka bertahan hidup. Dalam teori sosiologi, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang memiliki solidaritas, cinta kasih dan nilai-nilai luhur yang tinggi. Akan tetapi, dari teori-teori psikologi dapat dipahami tekanan lingkungan (eksternal) dan adanya dorongan nafsu (internal) akan memengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik terhadap lingkungannya maupun sesama manusia. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa manusia kadang lebih buas dari binatang buas mana pun.
2. Langkah-langkah dalam pemberantasan tindak premanisme solusi yang paling tepat adalah dengan membuat sebuah stabilitas ekonomi yang kuat, sehingga Negara bisa menjamin kemakmuran rakyatnya, di samping penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.

Judul skripsi adalah “*hubungan antara kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme*”. Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang keliru maka penulis

perlu memberikan pengertian kata-kata atau istilah yang terangkai dalam kalimat judu, pengertian kata atau istilah dimaksud sebagai berikut :

Menurut kamus ilmiah populer kemiskinan itu berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta (hartanya tidak mencukupi kebutuhannya); serba kekurangan.¹⁰ Sedangkan kemiskinan yang dimaksud disini adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup¹¹.

Adapun yang dimaksud Kebudayaan menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain,

¹⁰Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (edisi pertama, Yogyakarta, Arkola, 1994), h. 472.

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>.

tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat¹².

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kata preman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai partikelir, swasta, bukan tentara, sipil atau kepunyaan

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>.

sendiri.¹³ Preman juga biasa dimaknai “orang bebas”. Ada juga yang menyebut dari kata free man yang artinya arang bebas cenderung negatif, meresahkan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan, penulis telah menemukan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan aksi premanisme dan hubungannya dengan kemiskinan dan kultur, akan tetapi pada umumnya pendekatan dan perspektif yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan/ perspektif yuridis. Literatur yang ditemukan itu antara lain.

“Preman-Preman Jakarta”, Maruli C.C. Simanjuntak (Cet. I; Jakarta: pensil-243, 2007). Sebenarnya dalam buku ini mengulas kegiatan organisasi preman dalam mempertahankan eksistensinya, beserta bentuk, sasaran, waktu, hasil, dan wilayah kegiatannya. Dan menjelaskan bagaimana melakukan penanganan dan penanggulangan persoalan preman di masyarakat.

Sedangkan yang membahas mengenai tingkah laku sosial masyarakat dimuat dalam buku “Bandit Sosial”, Eric J. Hobsbawm, (Cet. I; Jakarta: Teplok Press, 2000).

Dan juga dalam buku “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum” Prof. Dr. Baharuddin Lopa, (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001). Dalam buku

¹³ webmaster@mediaindonesia.co.id.

ini membahas tentang kejahatan dan perubahan sosial, serta kecenderungan kejahatan dewasa ini.

“Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). hal yang dibahas dalam buku ini mengenai faktor-faktor yang membuat orang dapat berbuat jahat atau melanggar norma-norma hukum,

Yesmil Anwar, SH.,M.Si. dalam bukunya *Saat Menuai Kejahatan* mengatakan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan dapat menggapai kejahatan.

Juga H.TB. Aat Syafaat, S.Sos,M.Si. Drs. Sohari Sahrani M.M.,M.H.. Muslih, S.Ag. Dalam bukunya *Peranan pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalam Remaja* mengemukakan tentang masalah-masalah yang dialami oleh para remaja yang dapat mempengaruhi untuk berbuat kejahatan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam rangka keilmiahan dan kebenaran sebuah tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan dan menguraikan tentang yang penulis kaji dengan apa adanya.

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan syar'i yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada nash Al-Qur'an dan Hadis, dimana merupakan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan peraturan yang dihasilkan oleh perilaku ucapan dan ketentuan Nabi SAW.
- b. Pendekatan Empiris, merupakan penulisan yang digunakan dalam membuat skripsi ini, mengambil dari kenyataan yang ada. Baik melalui media massa, media cetak, dan fakta yang ada pada masa sekarang. Dan juga Berlandaskan pada peraturan-peraturan formal yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis digunakan dengan pertimbangan bahwa suatu hukum dikatakan berlaku apabila nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah metode kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Sehingga dalam hal ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, dan dua sumber data yaitu:

- a. Primer, yaitu mengutip isi atau sumber data secara langsung dari buku-buku rujukan tanpa mengubah redaksi dari sumber aslinya.
- b. Sekunder, yaitu isi atau sumber data dengan mengadakan perubahan atau hanya mengambil isi dari satu tulisan

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode induktif, yaitu metode yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu metode yang bersifat atau berangkat dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan dari semua data-data yang kita dapatkan, sehingga kita dapat menarik satu kesimpulan dari perbandingan yang lebih objektif.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan atas penulisan, penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yang akan diterangkan dan akan dijelaskan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Untuk menemukan bagaimana sebenarnya hubungan antara kemiskinan, kultur dan prinsip terhadap aksi premanisme yang semakin mengalami perkembangan.
- b. Untuk memahami Bagaimana sorotan syari'at Islam terhadap aksi tindak pidana premanisme.
- c. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menangani penomena-
penomena premanisme.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis; hasil penelitian berguna sebagai bahan kajian untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan hubungan antara kemiskinan, kultur dan prinsip terhadap aksi premanisme.
- b. Kegunaan praktis; hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk memberikan masukan kepada para penegak hukum untuk dapat menanggulangi aksi-aksi premanisme dan kemiskinan yang selama ini menjadi penyakit bangsa indonesia.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG PREMANISME

A. Pengertian Premanisme

Preman berasal dari bahasa Inggris yaitu *Free man* yang artinya orang merdeka, tidak terikat dengan beban tanggung jawab dari institusi tertentu dalam mencari nafkah. Dalam perkembangannya, istilah yang tadinya netral tersebut, mulai memuai konotasi negatif ketika para orang bebas itu menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki untuk melanggar hukum guna memenuhi kebutuhan materinya. Tatkala berbagai tindakan melawan hukum itu semakin terpola dan berkelanjutan, maka lama-kelamaan menjadi *isme*. Menjadi sejenis paham dalam melakukan kejahatan, sehingga siapapun yang melakukan tindakan tersebut dimasukkan ke dalam kategori sebagai preman. Pada kondisi inilah aksi para preman berubah menjadi premanisme.¹⁴

Dilihat dari asal katanya, ada juga yang berpendapat bahwa kata preman berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* dan istilah ini melekat pada kaum lelaki yang artinya lelaki bebas¹⁵ atau orang yang bebas, orang yang tidak terikat dan orang yang merdeka. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata preman setidaknya dapat diartikan dalam 3 (tiga) pengertian, ialah (1) swasta, partikelir, non-pemerintah,

¹⁴Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), h. 220.

¹⁵Maruli C.C. Simanjuntak, *Preman-Preman Jakarta* (Cet. I; Jakarta: Pensil-324, 2007), h. 40.

bukan tentara, sipil, (2) sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), (3) kuli yang bekerja menggarap sawah.¹⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertianpreman tersebut telah berbeda dengan pengertian preman saat ini. Menurut Kunarto (1995: 195-196), preman adalah “orang atau individu atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja, dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang. Namun, karena mereka melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan-penekanan fisik dan psikis, agar mau mendukung kebutuhan mereka. Sikap, tindakan, dan prilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme. Jadi, ada orang yang bukan preman, namun melakukan tindakan premanisme. Tetapi kalau preman pasti melakukan tindakan premanisme.”

Pendapat lain tentang preman. Menurut MA Latief dari hasil studinya pengertian preman adalah “seseorang yang mengelompokkan dirinya dalam suatu kelompok pergaulan, yang tidak terikat dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, mungkin mempunyai identitas dalam bentuk tato tertentu (sebagai tanda kelompok) mempunyai wilayah kekuasaan dan mempunyai

¹⁶<http://susub.blogspot.com/2009/02/vrijman-bukan-preman.html>

kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, seperti mencopet, menodong, memeras, menyiksa dan lain-lain.”¹⁷

Dari beberapa pengertian mengenai “preman” yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, “preman ialah seseorang atau sekelompok dengan identitas tertentu yang pada umumnya pengangguran, tidak berpenghasilan tetap dan tidak terikat pada norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan kriminal.”

B. Jenis-Jenis Premanisme

Dalam pembahasan mengenai jenis-jenis premanisme ada beberapa pendapat, preman dapat dibagi menjadi beberapa kategori :

1. preman kelas bawah yang beroperasi dalam lingkungan masyarakat umum dengan modus pencopetan, pemalakan, pungli.
2. preman kelas menengah yang bekerja dengan imbalan upah dari bos misalnya *debt kolektor*, preman pengawal pribadi.
3. preman kelas atas yang memiliki kekuasaan atau jabatan, dialah sang koruptor, atau pejabat yang melakukan pugli terhadap pemenang tender proyek pemerintah.¹⁸

Pendapat lain mengenai jenis-jenis premanisme berdasarkan hasil studi MA

¹⁷Maruli C.C. Simanjuntak, *op. cit.*, h. 40-41.

¹⁸Krinsa Yulianta, [http:// Realita Sosial. Lembar Lawas.com/2008/11/26/ Menggugat \(definisi\) Preman](http://Realita%20Sosial.LembarLawas.com/2008/11/26/Menggugat%20definisi%20Preman), Februari 22, 2010.

Latief, preman dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, pendapat ini tidak jauh bedah dengan pendapat diatas, yakni ringan, sedang, dan berat.

Preman taraf ringan beroperasi di area perumahan. Kebanyakan di antara mereka berumur relatif muda (beberapa masih duduk di bangku sekolah), dan belum menikah. Umumnya mereka bergabung dalam kelompok 4 sampai 10 orang, dengan pakaian yang bervariasi dari kumal ke rapih, dengan kecenderungan untuk mengikuti ciri-ciri preman, agar ditakuti masyarakat. Kelompok ini tidak selalu mengaku dirinya sebagai preman. Mereka melakukan tindak kriminal ringan, seperti mencuri *tape* dan radio mobil, kaca spion mobil, barang dagangan pasar, dan lain-lain. Hasil dari tindakan premanya digunakan untuk minum-minum bersama-sama.

Preman taraf sedang biasanya beroperasi di plaza-plaza, mal-mal, atau area-area perumahan, kebanyakan diantara mereka merupakan pendatang dari kota-kota lain, dengan latar belakang yang berbeda, dan telah mempunyai pengalaman sebagai preman di kota asalnya. Kebanyakan berumur sekitar 30an. Beberapa diantaranya, mempunyai seorang majikan yang menyewa mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Kelompok ini biasanya terorganisir, dan mempunyai pimpinan kepada siapa mereka meminta nasehat, dan perlindungan. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk minum-minum bersama teman-temannya, dan menghidupi keluarganya. Pada proses belajar awal untuk melakukan tindak kriminalitas, mereka minum alkohol guna meningkatkan keberanian, dan ketegaannya. Jika mereka sudah terlatih, atau sudah cukup berani, maka mereka tidak lagi menggunakan alkohol.

Preman taraf berat dapat berasal dari preman taraf ringan atau taraf sedang, namun seseorang dapat pula meningkat secara langsung dari seorang remaja yang sering berkelahi ke preman taraf berat, dengan perbuatan-perbuatan kriminal yang umumnya terus meningkat dalam frekwensi maupun kecanggihannya. Biasanya berusia diatas 35 tahun, beroperasi di tempat-tempat hiburan, pertokoan, perumahan atau di pekerjaan oleh orang lain untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti penggusuran rumah atau tanah, menagih hutang, mengorganisir perampokan dan lain-lain,. Mereka merupakan kelompok kriminal yang sudah mantap, mempunyai struktur organisasi, dan hirarki yang rapih, dan umumnya bertindak di belakang layar dengan mengatur orang-orang lain, namun tetap wajib melindungi anak buah yang terancam bahaya. Taraf sosio ekonominya tinggi. Sebagian besar dari penghasilannya sebagai preman dipakai untuk keperluan keluarganya. Cara berpakaianya lebih trendy, dan kurang menampilkan dirinya di depan masyarakat umum.¹⁹

Selain penggolongan preman ini, Imam Santosa dan Sarjono Jatiman berpendapat dan mengelompokkan preman dalam beberapa bentuk yaitu, preman jalanan, preman amatiran, preman karir, dan preman menengah atas.

Apabila baru merupakan preman jalanan, itu masih mudah diatasi. Apa yang dilakukan geng remaja pun mirip preman. Bedanya, geng remaja itu preman amatiran dan temporer. Sebab pemerasan yang dilakukan hanya sewaktu-waktu sesuai desakan

¹⁹Maruli C.C. Simanjuntak, *op. cit.*, h. 50-52.

kebutuhan. Tapi setelah tamat dari sekolah dan lalu bekerja, remaja bekas anggota geng umumnya tidak jadi preman amatiran lagi. Meski begitu, bekas anggota geng remaja itu bisa saja jadi preman karir. Tapi walaupun dianggap potensial merawankan, justru para anak jalanan yang berkeliaran di pasar-pasar dan di jalan-jalan. Di dalam usia 10 tahunan mereka sudah belajar kekerasan hidup tiap hari, dengan terus menggelandang. Saat mereka sudah menguasai seluk beluk lingkungan mereka jadi preman karir yang lebih membahayakan. Preman bisa berlangsung di lapis menengah atas yang relatif tidak didesak kesulitan ekonomi. Salah satu modus operandi premanisme di lapis atas malah bisa berbentuk formal terorganisir, seperti sindikat dengan kemasan bentuk usaha yang canggih. Contohnya debt collector (penagih piutang).²⁰

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia.

Pertama, preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas. *Kedua*, preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. *Ketiga*, preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan. *Keempat*, preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan

²⁰*Ibid.*, h. 53.

tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya. Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka dibackup aparat. Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memperlak para aparatnya²¹.

Ada lagi yang baru, yang mengenai premanisme agama, ada dua bentuk premanisme agama: Premanisme eksternal (antar agama) dan premanisme internal (antar sesama pengikut satu agama).²²

Premanisme internal biasanya dilakukan oleh sekelompok/segelintir pihak yang tidak puas atau tidak setuju dengan semakin berkembangnya suatu aliran yang mereka anggap sesat dan menyimpang. Dalam tindakannya itu, mereka tidak segan-segan mengklaim bahwa pendekatan represif yang mereka lakukan adalah “mewakili” suara mayoritas kaum Muslimin. Seringkali mereka mencari pembenaran dan penghalalan atas apa yang mereka lakukan melalui “fatwa”, legitimasi dari tokoh-tokoh kesohor Islam, atau ormas-ormas besar Islam. Alhasil, mereka sekuat tenaga berusaha mencari dalil dan dalih, meskipun harus memutarbalikkan sebuah fakta demi menyukseskan agenda yang mereka cita-citakan, yaitu KO-nya pihak yang

²¹http://kendariexpres.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=122

²²Muhammad Alcaff, <http://panoramaislam.wordpress.com/2009/03/29/premanisme-atas-nama-agama/>, Februari 22, 2010.

mereka cap sesat.

Ciri khas lain premanisme internal adalah sebelum beraksi, biasanya mereka menciptakan “opini buruk” terhadap ajaran yang mereka klaim sebagai sesat. Misalnya, mereka sebisa mungkin menanamkan pada masyarakat sekitar bahwa ajaran si A adalah baru, sesat dan meresahkan. Dan karena itu, selanjutnya harus segera ditumpas. Untuk rencana tersebut, mereka menyebarkan fitnah, membagikan selebaran gelap, atau mungkin memasang pengumuman yang sifatnya memprovokasi massa untuk bergerak dan bergabung dalam “karnaval kebencian” yang akan mereka gelar.

Premanisme sangat mudah ditunggangi pihak-pihak yang memang ingin memancing di air yang keruh. Dan kaum imperialis sangat pandai dan berpengalaman dalam memecah belah umat Islam. Maka jelas premanisme internal sama sekali tidak mewakili mayoritas umat Islam. Ia identik dengan gerakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit hati dan tidak memiliki nurani.

Kriteria lain premanisme internal adalah para peserta dan pendukungnya rata-rata berpendidikan rendah, “bonek” (bondo nekat), dan tidak tahu-menahu masalah dengan baik. Karena itu, mereka yang ototnya paling kuat dan tulangnya paling kokoh berada di depan untuk memimpin gerakan anarkis kolektif ini supaya dengan energik dapat meneriakkan suara kebencian dan melantunkan lagu permusuhan serta nyayian kutukan. Dengan kata lain, orang-orang yang terlibat premanisme internal adalah orang-orang “kelas kampung” dan “kelas desa” yang galtek (gagal teknologi)

alias tidak pernah bersentuhan dengan peradaban lain. Mereka hanya kenal satu selera dan satu menu. Ibarat mereka hanya kenal tahu dan tempe. Mereka paksa orang lain untuk hanya membeli dan mengonsumsi makanan yang selalu mereka makan, tidak peduli orang lain suka atau tidak, berselera atau tidak.

Di samping kriteria/ciri khas di atas, premanisme internal juga acap kali menggunakan atribut dan simbol-simbol agama, sehingga gerakan mereka meski tampak begitu “angker” dan anarkis terkesan sebagai keharusan dan konsekuensi untuk membela kebenaran dan menghancurkan kemungkaran. Dengan kata lain, tindakan represif mereka dalam rangka amal makruf nahi mungkar. Karena itu, dalam aksi anarkisnya, mereka biasanya memakai asesoris agama, seperti kopyah, peci, gamis dll. Ini mereka lakukan untuk membedakan “premanisme” mereka dengan premanisme ala pasar dan terminal.

Menurut hemat kami, ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya premanisme agama: Pemimpin (ulama su’ yang tidak bertanggung jawab), umat (audien yang taklid buta), dan landasan/rumusan teologis yang salah.

Dimensi pertama, yaitu pemimpin (ulama su’ yang tidak bertanggung jawab) sangat berperan besar dalam mendalangi sebuah aksi kekerasan dalam internal agama. Kekerasan antar pengikut agama biasanya dipicu oleh statement (pernyataan) propokatif dan tidak edukatif seorang tokoh agama yang punya pengaruh di tengah masyarakat. Semakin kuat pengaruh tokoh agama ini, maka semakin luas dampak

kekerasan yang ditimbulkan karena secara otomatis melibatkan banyak massa. Kalau yang memfitnah ulama kelas kampung maka bisa dipastikan akibat fitnahan ini gaungnya hanya berkisar antar RT dan RW. Tapi kalau yang menebar perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam ulama kelas kakap alias ulama nasional maka bara kebencian yang dinyalakannya sulit dipadamkan.

Di sinilah ulama memegang kata kunci dalam setiap problem umat. Ulama harus sadar bahwa mereka adalah pewaris ilmu dan akhlak Nabi saw. Jika ulama salah langkah maka dampak dan korbannya sangat besar. Karena itu, tidak heran Nabi saw mengingatkan ulama bahwa: “ulama su’ akan direbus dalam api neraka sebelum penyembah berhala”.

Dimensi kedua, adalah umat (audien yang taklid buta). Umat yang tidak kritis dan hanya membebek pemimpinnya akan berbuat anarkis, tanpa peduli akibat dari perbuatan mereka. Umat yang “mengamini” ajakan pemimpin dan ulama su’ meskipun mereka diajak masuk sumur dan bahkan jurang adalah umat yang jahil murakkab (bodoh yang dobel).

Dimensi ketiga, adalah landasan teologis. Mungkin saja suatu tindakan anarkis dilakukan oleh umat karena penafsiran yang salah dari teks agama. Kesalahan penafsiran ini biasanya diinjeksikan oleh pemimpin mereka kepada kaum awam. Misalnya, mereka menganggap bahwa merusak rumah pribadi atau rumah ibadah suatu aliran yang sesat adalah jihad besar dan ibadah yang agung. Dengan landasan

agamis yang keblinger ini umat bersemangat untuk menodai kehormatan saudara seagamanya demi mendapatkan pahala di sisi Tuhannya.

Jadi pada hakikatnya pelaku premanisme adalah orang yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi dari ketidakberdayaan, kelemahan, dan kebutuhan seseorang. Sikap korbannya kebanyakan terpaksa. Terpaksa demi keamanan, kelancaran, tujuan dan terpaksa karena takut²³.

Secara awam orang beranggapan seorang preman itu adalah sosok yang dengan fisik yang serem bertato dan bau nafas minuman keras serta tinggal di jalanan atau tempat-tempat keramaian, itu adalah hal yang klasik. Beda lagi dengan preman yang jauh lebih sadis yaitu preman birokrasi. Nilai materi yang diperas dari objek lebih besar. Anehnya kadang-kadang orang menebak nilai materi yang ditawarkan oleh pelaku tersebut. Betapa rendahnya martabat kita demi melegalkan sebuah kejahatan.

Dilihat dari tempat dan kejadian, bentuk premanisme terbagi atas :

1. Premanisme Terbuka

Bentuk premanisme ini terdiri pemersaan langsung dengan meminta sejumlah uang atau materi dengan ancaman. Biasanya pelakunya orang-orang yang nekad dan agak ekstrim.

2. Premanisme Terselubung

²³<http://hukum.kompasiana.com/2010/05/20/premanisme-subur-karena-terpupuk/>

Bentuk premanisme ini tidak terlihat langsung, proses dan reaksinya hanya dirasakan oleh korban yang dituntut untuk mengeluarkan biaya diluar aturan. Bentuk premanisme ini biasanya di lingkungan birokrasi yang tumbuh akibat kebutuhan seseorang yang dimanfaatkan oleh oknum dari dalam atau dari luar yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih fatal lagi aturan main ini kadang dijadikan sebuah budaya. Bentuk premanisme ini yang kini sangat membudaya disekitar kita dengan mengatasnamakan kemudahan dan kepuasan pelayanan. Yang secara tidak sadar kita telah terkondisikan akan situasi tersebut. Secara tidak sadar pula hal itu telah memupuk pertumbuhan perilaku premanisme terselubung yang bisa saja dituruti oleh perilaku tersebut akan diulangi oleh penerusnya. Bahkan kemungkinan besar akan ditiru oleh pihak lain dari kegiatan yang sejenis.

Inilah lingkungan yang biasanya menjadi tempat atau sarang tumbuh dan berkembangnya bentuk premanisme : Tempat berjualan /dagang, Tempat antrian, Lowongan Pekerjaan, Kenaikan jabatan, Proyek Pembangunan, Sarana kebutuhan umum dan Bantuan dan sumbangan.

Penegak hukum atau aparat kepolisian sering memberantas kegiatan premanisme. Hanya yang diberantas itu premanisme terbuka yang jelas terlihat meresahkan masyarakat. Tetapi yang namanya premanisme terselubung jarang tersentuh karena kegiatannya terkamuflase oleh suatu kebutuhan. Mau terselubung atau tidaknya hal ini sudah merugikan orang lain dan melanggar hukum dan ini adalah perbuatan kriminal.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Premanisme

Bentuk-bentuk kejahatan atau kriminalitas kini sudah berubah. Kejahatan dewasa ini tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. Kejahatan kini cenderung lebih banyak dalam bentuk beberapa kejahatan dilakukan sekaligus dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sudah sangat sering kita membaca di koran-koran tentang adanya suatu atau sejumlah komplotan penjahat yang sering di sebut preman.

Seorang kriminolog bernama Jonathan Casper mengemukakan suatu uraian yang dapat disimpulkan, bahwa seorang penjahat atau preman (pelanggar hukum) bukanlah semata-mata hasil dari kurang sempurnanya Undang-Undang, sehingga didapati sejumlah perbuatan yang melawa hukum yang belum ditetapkan sanksinya. Atau, tipisnya moral ataupun kurangnya pengertian dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh si pelaku, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain.

Faktor yang lain itu dinamakan *natural inclination*. Mungkin *natural inclination* ini dapat diartikan *a born criminal*, yaitu orang yang sejak lahirnya telah membawa serta bibit-bibit negatif, sehingga pertumbuhannya, lebih-lebih kalau di besarkan dalam lingkungan yang mendukung (misalnya di lingkungan masyarakat yang berbudaya suka mencuri, berjudi, dan sebagainya), mudahlah ia akan menjadi pencuri atau penjudi.²⁴

²⁴Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001), h. 8-9.

Ciri-ciri lain oknum-oknum penjahat seperti ini, antara lain ia mencuri bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi sudah merupakan pembawaannya. Ia membunuh bukan karena menghindari agar ia tidak dibunuh terlebih dahulu (membelah diri), tetapi disebabkan pembawaannyalah yang demikian.

Biasanya orang seperti ini cenderung melakukan kejahatan berulang-ulang, karena kurang merasakan, bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan moral atau bertentangan hati nuraninya. Ada kalanya ia sadar, bahwa perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang, namun tetap ia lakukan karena dorongan kecenderungan sifat negatif yang dimilikinya. Karena ini dinamakan penjahat kambuhan (*residivis*).²⁵

Dengan tetap adanya penjahat kambuhan, menyebabkan bahaya yang mengancam keselamatan pribadi atau masyarakat, tidak akan berkurang. Sudah menjadi kenyataan, bahwa semakin maju suatu negara semakin banyak pula muncul bentuk-bentuk kejahatan di negara kita. Kemajuan teknologi yang membawa kemajuan transportasi dan komunikasi mendukung terlaksananya kejahatan-kejahatan yang canggih pula dan sudah menjurus menjadi kejahatan transnasional.

Pengamat sosial FISIP Unila Abdul Syani melihat permasalahan ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang seseorang menjadi preman. Terlebih lagi itu ditunjang sulitnya mencari pekerjaan dan media terutama televisi yang memberikan contoh perilaku secara gamblang.

²⁵*Ibid. h. 9.*

Penyebab utama seseorang menjadi seorang preman adalah faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Dengan faktor-faktor itulah, bagi yang kurang sabar, terpaksa melakukan pelanggaran hukum (mencuri, menipu, menggelapkan/korupsi, dan sebagainya) sedangkan peningkatan kejahatan pembunuhan, biasanya mengikuti peningkatan kejahatan pencurian/ perampokan, karena pada dasarnya motifnya pun hampir sama (lebih banyak dipengaruhi faktor sosial ekonomi).²⁶ Terutama berkaitan upaya mereka bertahan hidup. "Manusia yang hidup secara berkecukupan, dalam artian normal secara ekonomi saja bisa melakukan korupsi. Makanya akhirnya mereka melakukan perbuatan tersebut untuk mencoba bertahan hidup. Sehingga akhirnya mereka sangat terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan kekerasan,".

Bahkan, mereka kerap melihat lingkungan dan terutama media televisi yang memperlihatkan bagaimana seseorang mencari jalan pintas. "Sebab itu, akhirnya itu yang membuat kebanyakan orang-orang ini mencoba bergabung orang-orang yang berperilaku keras dan senasib."

Selain itu, Abdul Syani melihat lemahnya aparat keamanan dalam menindak tegas preman-preman yang melakukan "kekerasan" kepada masyarakat, juga menjadi pemicu maraknya premanisme di Indonesia. "Aparat lebih menunjukkan sifat yang lebih menunggu. Sementara tindakan tegasnya sama sekali tak tampak.

²⁶Baharuddin Lopa, *Op. cit.*, h. 15.

Sebenarnya, meningkatnya kuantitas preman dan kualitas tindakan kriminalnya tidak pernah tidak lepas dari perkembangan sosial ekonomi secara makro. Berbagai kalangan mencoba mengaitkannya dengan budaya konsumerisme. Tetapi, tentu saja tidak sesederhana itu.

Para preman yang terdapat di perkotaan, khususnya di kota-kota besar, mayoritas berusia 17--35 tahun. Untuk berkomunikasi, mereka sering menggunakan bahasa daerah. Ini mencerminkan mereka umumnya adalah pendatang dari pedesaan, baik dari provinsi yang sama maupun provinsi yang berbeda. Dari sisi pendidikan, mayoritas berpendidikan menengah dengan rata-rata tingkat menengah pertama.

Dalam teori sosiologi, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang memiliki solidaritas, cinta kasih dan nilai-nilai luhur yang tinggi. Akan tetapi, dari teori-teori psikologi dapat dipahami tekanan lingkungan (eksternal) dan adanya dorongan nafsu (internal) akan memengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik terhadap lingkungannya maupun sesama manusia. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa manusia kadang lebih buas dari binatang buas mana pun.

Tekanan untuk bertahan hidup (*survive*), misalnya, akan mendorong manusia bertindak apa pun, termasuk tindakan kriminal, yang justru sangat berbahaya buat dirinya. Ini yang luas terjadi pada zaman ekonomi sulit sekarang. Tuntutan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga memaksa seseorang bertindak kriminal.

Premanisme sosial yang cenderung meningkat, juga disebabkan premanisme politik yang banyak dilakukan oleh para pejabat dan elit politik untuk mendapatkan kekuasaan. Kita tidak bisa begitu saja menetapkan bahwa premanisme sosial terjadi tanpa sebab. Karena sebenarnya, premanisme sosial timbul akibat maraknya premanisme politik yang dilakukan oleh para elit dalam menjalankan politiknya," kata pengamat sosial politik, Erlangga Masdiana.

Premanisme yang dicontohkan para pejabat dan elit politik, seperti politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan politik lainnya, memberikan contoh tidak langsung bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan premanisme dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

"Penegakan hukum yang tidak adil antara si kaya dan si miskin juga mencontohkan adanya praktek premanisme yang dilakukan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan dan memantapkan kekuasaan dalam pemerintahan.



BAB III

PREMANISME DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Premanisme Ditinjau Dari Hukum Positif

Dari ketentuan hukum pidana yang berlaku, istilah Preman tidak dikenal, namun Preman dapat dikenal dan dikenai pasal pidana karena perbuatannya. Dengan demikian dapat dipahami, premanisme menurut hukum positif bukanlah suatu bentuk yang mengandung norma-norma yang baik melainkan perbuatan yang mengenai keadaan yang menimpahkan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang atau orang lain.

Dengan pembatasan pengertian Preman sebagai orang yang melakukan tindak pidana, maka premanisme dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, misalnya pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka Preman dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan²⁷. Yang berbunyi (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

²⁷<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=40966>

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan²⁸.

Dari uraian-uraian sebelumnya dapatlah dipahami bahwa Premanisme identik dengan perbuatan anarkis dan kekerasan, yang merupakan tindakan kejahatan yang dapat merusak dan merugikan bagi seseorang maupun diri sendiri. Ketika agama islam diturunkan, masyarakat manusia sudah mengalami bentuk premanisme yang berbentuk anarkisme dan kekerasan, dan merupakan bagian sejarah yang tak terhindarkan dan merupakan suatu proses Allah yang membangun ekosistem dalam sejarah itu sendiri agar bentuk kekerasan tak pernah terjadi.

Lebih dari itu bentuk premanisme yang muncul sekarang ini sudah bersifat somtom, penyakit sosial yang berakar pada mental manusia bahkan telaah yang menganalisa bahwa bentuk kekerasan ini muncul karena tekanan ekonomi, ketidakadilan, kurang keseimbangan antara kreasi dan rekreasi dan sebagainya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa premanisme itu identik dengan anarkisme dan kekerasan, yang kemudian akan dijelaskan secara keseluruhan tentang tingkat kekerasan tersebut.

1. Kekerasan Fisik

²⁸Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad* (Cet. 8; jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 226.

Kekerasan fisik merupakan suatu kekerasan yang menggunakan suatu kekuatan yang dapat merugikan bahkan menghancurkan sehingga selagi manusia masih menjadi manusia, maka sikap kekerasan selalu ada, karena watak manusia itu sendiri menjadi serigala dari sesama manusia karena nafsu yang dimilikinya selalu menghendaki agresi tidak mampu menahan emosi, selalu cinta dengan kekuasaan dan kekayaan dan persaingan dalam mencari keuntungan.

Karena individualisme yang mereka miliki, maka mereka ingin dirinya selalu berada diatas dari pada yang lain, itulah sehingga terjadi kekerasan yang dapat merugikan seseorang, bahkan harta benda dapat melayang dan hal perbuatan ini dapat dicontohkan kekerasan fisik yang digunakan adalah sebagai berikut: pencurian, pemerasan, penganiayaan, sampai pemerkosaan terhadap anak dibawa umur dan pembunuhan. Berikut penjelasan masing-masing dan pembagian diatas dalam melihat suatu bentuk kekerasan fisik maupun non fisik terhadap tindak kekerasan yang tergolong didalamnya.

a. Pencurian

Pengertian pencurian dan pemerasan itu penting dijelaskan menurut bahasa hukum indonesia mengingat kedua istilah tersebut sering terjadi dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan milik orang lain. Kata “*curi*” artinya mengambil dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti

mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri²⁹.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, yang disebut pencurian itu ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam hal ini, ada yang disebut pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan.

Istilah pemerasan berasal dari kata “peras” atau “perah” yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman orangnya disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan³⁰.

Di dalam ketentuan KUHP secara rinci disebutkan pada pasal 368, 369 KUHP Pasal 362.

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, diancam karena

²⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 97.

³⁰*Ibid*, h. 98.

pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900, 00 (sembilan ratus rupiah)”.

Pada pasal di atas terdapat unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil tanpa izin.
- b. Yang diambil haruslah suatu barang.
- c. Barang tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum.

Pada pasal 364 KUHP; perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,00 karena pencurian ringan, dikenai pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Ketentuan diatas adalah pencurian ringan asalkan barang yang dicuri harganya tidak lebih dari Rp. 25,00 artinya harganya persis sekitar Rp. 25,00 atau kurang dari Rp. 25,00 dapat dimasukkan dalam pencurian ringan, sedangkan lebih dari Rp. 25,00 atau barang yang tidak dapat dinilai dengan uang hal ini tidak termasuk pencurian ringan.

Pasal 365 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan no. 2.

Pasal tersebut di atas mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal ini bukan pencurian biasa yang dicantumkan dalam pasal 362, tetapi pencurian dengan

ancaman hukuman diperberat dan hal ini termasuk delik yang dikualifikasikan, sebagaimana ditentukan syarat-syaratnya oleh bagian ke-1 sampai ke-4 pasal 365 KHUP.

Pada pasal 365 KUHP bahwa ini pencurian berat dengan kata lain pencurian dengan kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan disini termasuk pula orang yang mempunyai rumah menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, asal maksudnya untuk menyimpan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya.

b. penganiayaan

Di dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, cuma menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Sedangkan pengertian lain bahwa penganiayaan ialah sengaja merusak atau mengganggu kesehatan diri sendiri atau orang lain

Tatapi Seringkali masyarakat salah dalam menggunakan kedua kata-kata antara penyiksaan dengan penganiayaan. Kesalahan ini karena pengertian kedua kata

ini dianggap sama. Padahal, makna penyiksaan dan penganiayaan amatlah jauh berbeda. Kalau kita melihat dari definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aniaya diartikan sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan atau penindasan. Penganiayaan diartikan perlakuan yang sewenang-wenang; menganiaya diartikan memperlakukan dengan sewenang-wenang; dan teraniaya diartikan sebagai tersiksa atau tertindas. Sedangkan kata siksa diartikan sebagai penderitaan (kesengsaraan, dan sebagainya) sebagai hukuman, hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti); menyiksa adalah menghukum dengan menyengsarakan, berbuat dengan menyengsarakan, berbuat bengis kepada yang lain dengan menyakiti; penyiksaan adalah proses, cara, perbuatan menyiksa, penganiayaan³¹.

Diskursus HAM sendiri memberikan pengertian yang beda dari KBBI. Kalau kita merujuk pada Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh hukum Indonesia melalui UU No 05 Tahun 1997, penyiksaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk

³¹http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7671:arti-penyiksaan-dan-penganiayaan&catid=52:konsultasi-ham&Itemid=77

diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Artinya setiap pejabat pemerintah yang melakukan kekerasan dengan tujuan mencari informasi dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan. Misalnya penyiksaan yang sering terjadi di sel tahanan kepolisian saat interogasi.

Sementara penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dan dilakukan oleh siapapun (sipil) kecuali pejabat pemerintah. Contohnya, pemukulan yang dilakukan oleh antara masyarakat sipil.

Penyiksaan merupakan kejahatan yang terqualifikasi dalam azas *non derogable rights*, yaitu sebuah kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan kepada siapapun dalam keadaan apapun dan pada zaman apapun (meskipun konflik), hal ini secara normatif dijamin dalam Konvensi Anti Penyiksaan 1984 maupun dalam hukum Humaniter (konvensi Geneva 1949). Bahkan sangking seriusnya tindakan penyiksaan, sebuah lembaga swadaya pemerhati HAM (Asian Human Right Commission (AHRC)), menyatakan bahwa penyiksaan adalah ibu dari segala kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena penyiksaan memang bukan sebuah kejahatan penghilangan nyawa, tetapi tetap merupakan sebuah pembunuhan atas sebuah penghidupan.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai

beberapa unsur sebagai berikut³².

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni, rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh

Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II, pasal 351s/d 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP

³²<http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Panganiayaan berencana pasal 353 KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

4. penganiayaan berat pasal 354, 355 KUHP

Pasal 354

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Setelah melihat perbuatan premanisme ini jelas akan nampak sesuatu perbuatan sikap yang tercelah bahkan dibenci oleh Allah sendiri, sehingga perbuatan premanisme ini harus di hilangkan mulai sampai keakar-akarnya.

Lebih dari itu akibat perbuatan premanisme mulai dari pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Ini semua terjadi dikarenakan akibat penyakit sosial yang berakar pada mental manusia dan karena tekanan ekonomi, bahkan ketidakadilan sampai kurangnya keseimbangan antara kerja dan reaksi, bahkan kurangnya pendidikan dan sebagainya.

B. Premanisme Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam sejarah keberadaan dan peradaban manusia, hukum senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan manusia, oleh karena hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai keadilan, kemamfaatan dan kemanusiaan. Di samping itu, hukum merupakan norma-norma abstrak yang otonom tanpa

menghiraikan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu, bahkan hukum sebagai alat yang dipakai untuk mengatur masyarakat sehingga senantiasa berusaha mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya³³.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam disamping hadis Nabi saw. Memuat berbagai bidang persoalan secara lengkap. Hal ini jika dilihat dari segi keuniversalannya, bukan dari segi detailnya. Bidang-bidang itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan *al-ahkam al-amaliyyah* (hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan praktis manusia). Hukum-hukum *amaliyyah* itu meliputi *al-ahkam al-ibadah* (hukum-hukum peribadatan), *al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah* (hukum-hukum keluarga), *al-ahkam al-madaniyyah* (hukum perdata), *al-ahkam al-jina'iyah* (hukum pidana), *al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum ketatanegaraan), *al-ahkam al-da'liyyah* (hukum internasional) dan *al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah* (hukum ekonomi dan keuangan).

Allah Swt. Sangatlah menghargai arti kehidupan hamba-hambanya, maka Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perilaku umatnya dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan salah satu diantaranya adalah hukum islam. Namun demikian untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai hal yang merusak bahkan merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan atau merugikan anggota-anggota masyarakat atau benda

³³Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 18.

bahkan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara yang biasanya disebut dengan istilah premanisme.

Walau pun al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum islam yang utama, yang memuat berbagai bidang persoalan, tetapi secara implisit dalam syariat islam tidak ada sama sekali, jangankan pengertian, istilah premanisme sendiri itu tidak ditemukan didalam syariat islam. Namun pada dasarnya pengertian premanisme dengan mengandung pemaknaanya dalam bentuk bentuk *kemungkaran, kezaliman dan kerusakan*. Ini berarti bahwa diantara syariat islam tidak ditemukan pengertian premanisme sama sekali dalam istilah hukum islam, akan tetapi substansi atau prinsip-prinsip premanisme itu ada.

Dari pengertian premanisme menurut hukum islam dalam istilah kemungkaran, kerusakan dan kezaliman, kita dapat menarik kesimpulan bahwa premanisme adalah suatu bentuk perbuatan kejahatan yang dilarang oleh agama yang dapat menghancurkan dan merugikan, bahkan merusak baik dari manusianya maupun negaranya sendiri.

Berangkat dari asumsi-asumsi tentang bentuk bentuk premanisme akan dijelaskan secara umum bahwa premanisme ini merupakan suatu kejahatan yang menjadi bentuk “kezaliman atau kemungkaran” yang menimbulkan berbagai macam bencana.

Sebelum penulis menjelaskan bentuk-bentuk premanisme, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa sebenarnya kezaliman itu ? Dalam bahasa yang lebih umum disebut kejahatan, sedang dalam khas agama, disebut dosa, lawan dari pahala. Menganut agama hampir mustahil tanpa menerima dan menghayati konsep pahala dan dosa ini, dalam berbagai kejahatan. Apalagi jika agama itu berpusat pada keimanan kepada Tuhan yang menghendaki perbuatan baik sebagai medium pendekatan kepada-Nya³⁴.

Firman Allah SWT. (Q.S. 18/110).

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا

Terjemahnya :

Katakanlah: Sesungguhnya Aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (Q.S. 18/110).

Tentang perbuatan baik atau pahala, kiranya sudah lebih jelas, tapi bagaimana dengan larangannya, yaitu perbuatan jahat atau dosa ? ini pun untuk kebanyakan kita

³⁴Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (Cet. I; Jakarta: Mizan, 2006), h. 1384.

juga sudah jelas. namun kita hendak mempertajam salah satu segi tentang pengertian dosa itu.

Berkaitan dengan ini amat menarik memerhatikan dalam kitab suci perkataan yang banyak digunakan untuk arti “kejahatan” atau “dosa” ialah “zulm” sedangkan pelakunya, yakni orang yang berbuat dosa atau kejahatan, disebut zhalim. Dari sudut makna kebahasaan atau etimologi, zulm itu artinya gelap, karena kejahatan itu menimbulkan kegelapan hati. Dan zhalim berarti orang yang melakukan kegelapan³⁵.

Trem zulm dengan kata jadiannya yang terulang sebanyak 289 kali dalam al-Qur'an. Mempunyai arti yang bervariasi. Misalnya aniaya, kejahatan, dosa, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Meskipun demikian, arti yang bervariasi itu semuanya dapat dirujuk pada arti dasarnya. Yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang seharusnya³⁶.

Berdasarkan batasan zulm yang telah dikemukakan yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya. Ataupun pelanggaran hak-hak orang lain. Maka semua kesalahan pada hakikatnya, dapat disebut zulm. Oleh karena itu, zulm mempunyai peringkat-peringkat mulai dari kesalahan yang terkecil sampai

³⁵ *Ibid*, h. 1385.

³⁶ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 61.

kepada kesalahan yang terbesar atau yang terberat. Semuanya dapat dikategorikan sebagai kezaliman³⁷.

Dalam al-Qur'an term-term zulm lebih banyak mengacu pada perbuatan-perbuatan yang tergolong dosa berat, namun tidak sedikit pula perbuatan yang tergolong dosa kecil diidentifikasi sebagai zulm. Misalnya pelanggaran terhadap hudud Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. 2/ 229).

³⁷ *Ibid*, h. 62.

Dari penjelasan diatas kita dapat menari kesimpulan tentang bentuk-bentuk premanisme dalam bentuk kezaliman atau kemungkaran, dan penulis akan coba menyatukan sejumlah kemungkaran atau kezaliman diantaranya :

1. Perzinahan

Menurut al-Mawardi dan Abu Ya'la, zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang berakal memasukkan pucuk kemaluannya kedalam salah satu vagina atau dubur yang tidak ada hubungan perkawinan yang sah antara keduanya. Selanjutnya al-Mawardi mengemukakan pendapat Abu Hanifah bahwa zina hanya bisa terjadi bila seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam vagina atau duburnya wanita. Sayyid Sabiq berpendapat zina adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan tanpa adanya hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluar spermanya³⁸.

Perbuatan perzinahan ini adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Karena perzinahan merupakan perbuatan atau perilaku yang menyerupai binatang. Sebagaimana dalam firmanya (Q.S. 24/2.)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

³⁸Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Op. Cit, h. 104-105.

Terjemahannya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

2. Mencuri

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pencurian adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimilikinya. Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan mencuri. Hal ini tidak ada salahnya bila di kemukakan, yaitu *menipu*, menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian; *korupsi*, yaitu mengambil hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat, dengan menggunakan kewenangan atas jabatan dan/atau kekuasaan, sehingga merugikan orang lain; *menyuap*, menyuap merupakan seseorang yang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril, sedangkan pemberiannya itu ada pihak lain yang dirugikan³⁹.

Tentang pelarangan mencuri oleh Allah Swt. Sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an. (Q.S.05/38).

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 62

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahanya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Perampok dan penodongan

Penodongan ini merupakan perampasan atau merampas barang milik orang lain dengan cara memaksa korbannya, pada umumnya kata penodongan lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar rumah, jika perbuatan yang sama yang dilakukan pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan perampok. Dalam hukum islam pelaku kriminal yang demikian, yaitu penodong dan/atau perampok di istilahkan oleh kitab-kitab fiqh klasik “muharib”. Secara harfiah hirabah pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya ialah, pencuri yaitu mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan hirabah ialah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis, misalkan merampok, mengancam atau menakut-nakuti orang⁴⁰.

Para fuqaha (ahli hukum islam) mengategorikan penodongan atau perampokan dengan pencurian besar. Namun pengertian *muharib* saat ini di indonesia

⁴⁰ *Ibid*, h. 69.

bisa di sebut pelaku teroris⁴¹. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an. (Q.S. 05/ 33).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. 05/33).

4. Pembunuhan

Pembunuhan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia . apabila diperhatikan perbuatan seseorang atau beberapa orang , maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, pembunuhan disengaja (amd), tidak disengaja (khata), dan pembunuhan semi disengaja (syibhu al-amd)⁴².

⁴¹*Ibid*, h. 69-70.

⁴²*Ibid*, h. 24.

Pembunuhan sengaja(amd), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak membunuh.

Pembunuhan tidak sengaja (khata) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang oleh orang lain dengan tujuan mendidik. Contohnya, seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itumeninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd).

Dasar hukum tentang pembunuhan yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S.02/178)

Qishas yang dimaksud dalam ayat diatas ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Pembagian-pembagian atau penggolongan tentang perbuatan premanisme yang dijelaskan dalam syariat islam seperti ini merupakan suatu hal yang amat penting, sebab dalam agam islam memerintahkan untuk beristiqamah menjalankan syariat dan dijelaskan secara maknanya adalah menjauhkan diri dari kerusakan dan tindakan-tindakan yang amoral yaitu yang keluar dari berpegang kepada syariat Allah, yaitu melakukan kekafiran atau kemaksiatan sebab sebagian ayat-ayat dapat

dikelompokkan dalam kesatuan aturan yang mengidentifikasi perbuatan-perbuatan kehinaan tersebut.

Sebagaimana firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Terjemahannya :

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi. (Q.S. 02/27).

Para ahli tafsir menafsirkan ayat diatas bahwasanya ada perjanjian antara manusia dengan Allah yakni bahwa mereka mengakui keesaan Allah, serta patuh dan tunduk kepadanya. Namun perjanjian ini terlaksana melalui nalar dan fitrah mereka sebelum dikotori oleh kedurhakaan-kedurhakaan perbuatan tersebut sehingga sebahagian berpendapat perjanjian itu telah terjadi pada suatu ketika di suatu alam sebelum manusia dilahirkan di dunia ini.

Perjanjian juga mengandung bahwa merupakan wasiat Allah Swt. Kepada makhluknya dan memerintahkan kepada mereka untuk taat kepadanya dan melarang untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Swt. Tetapi manusia terlalu serakah sehingga banyak diantara mereka yang ingkar kepada-Nya, berbuat

kerusakan dimana-mana, baik dilaut maupun di darat. Sebagaimana telah di sebutkan dalam firman-Nya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Yang pasti dan harus diketahui setiap orang muslim dan siapa pun yang berakal akan menginginkan ketentraman bahkan islam dan syariatnya yang abadi sangat peduli terhadap kehormatan manusia yang menganggap pelanggaran terhadap jiwa, harta dan kehormatan sebagai tindakan kejahatan yang harus diberi hukuman keras. Tindakan premanisme dalam bentuk apapun, semuanya merupakan tindak pidana sosial yang harus dituntaskan secara keras dan pasti agar orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi agar tidak lagi berani mengganggu keamanan individu dan sosial.

Dilihat dari perbuatan premanisme sangat memberikan suatu kejelasan yang baik bahwa sesungguhnya perbuatan premanisme termasuk perbuatan yang terkutuk yang sangat dibenci Allah dan tetap akan berdampak dalam implikasi yang sangat mendalam. Ini memberikan kejelasan bahwa pada dasarnya premanisme menurut

kecamata agama akan selalu menimbulkan kebencian menuju kehancuran,
melahirkan nilai-nilai negatif bahkan sampai menuju suatu kematian.



BAB IV

HUBUNGAN KEMISKINAN DAN BUDAYA TERHADAP AKSI PREMANISME

A. Pengaruh Kemiskinan dan budaya Terhadap Aksi Premanisme

1. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Terjadinya Aksi premanisme

Sebelum penulis membahas bagaimana pengaruh dan hubungan kemiskinan terhadap terjadinya aksi premanisme, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kemiskinan itu. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa kemiskinan itu berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta (hartanya tidak mencukupi kebutuhannya); serba kekurangan. Sedangkan kemiskinan yang dimaksud disini adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Dari pengertian kemiskinan sebelumnya, ada juga yang mendefinisikan bahwa kemiskinan itu ialah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi,

tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat⁴³.

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya⁴⁴.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalankan kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan

⁴³Modul, *Advokasi anggaran pro Rakyat Miskin Berbasis Ormas Islam* (Cet. I; Jakarta: Seknas Fitra & The Asia Foundation), h. 46.

⁴⁴*Ibid.* h. 46-47.

penegasan kepada kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ha-hak dasar masyarakat miskin.

Kemiskinan sudah disepakati sebagai masalah sosial, tetapi penyebabnya dan bagaimana mengatasinya bergantung pada ideologi yang dipergunakan. Paling tidak secara sederhana kita dapat melacak ideologi-ideologi itu pada tiga kelompok besar. Yaitu Konservatisme, liberalisme dan radikalisme. Kaum konservatif yang dicetuskan oleh Oscar Lewis, memandang kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tapi berasal dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena ia tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalistik, tidak ada hasrat untuk berprestasi, dan sebagainya. Orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya tersendiri, yaitu *culture of poverty* (budaya kemiskinan)⁴⁵.

Memang, konsep budaya kemiskinan ini telah lama ditumbangkan secara ilmiah. Valentine, salah seorang di antara kritikus konsep ini. Valentine sebenarnya bukan seorang radikal, ia seorang liberal. Kaum liberal memandang manusia sebagai makhluk yang baik, budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situasional adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomis diperbaiki, dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan itu segera ditinggalkan.

⁴⁵Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif Ceramah-Ceramah di Kampus* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1986), h. 92

Orang miskin pada hakikatnya tidak berbeda dengan orang kaya; mereka hanya mempunyai posisi yang sangat tidak menguntungkan.⁴⁶

Kaum radikal tidak menggubris soal culture of poverty. Mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik, dan sosial. Mereka miskin karena memang mereka dilestarikan untuk miskin. Kemiskinan mempunyai fungsi yang menunjukkan kepentingan kelompok dominan, *ruling elites* (elit penguasa), atau kelas kapitalis. Berbeda dengan kaum konservatif dan liberal, kaum radikal memandang manusia sebagai makhluk sosial yang koperatif, produktif, dan kreatif bila mereka bersifat sebaliknya, hal itu terjadi karena sistem ekonomi dan politik memaksanya begitu. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara-negara terkebelakang miskin, sebab mereka secara berencana memang dimiskinkan. Kata strahm, pembangunan yang terjadi hanyalah “entwickelung der unterentwickelung” (pembangunan keterbelakangan dan pengembangan kemiskinan)⁴⁷.

Ada pula orang yang beranggapan bahwa apa pun yang kita lakukan untuk menolong orang miskin tidak akan bermamfaat, selama sistem yang ada adalah sistem jahiliah: suatu sistem yang berdasarkan penindasan dan pengisapan. Orang-orang miskin itu tidak lemah, tetapi dilemahkan. Seorang budayawan Mangun Wijaya

⁴⁶*Ibad*, h. 93.

⁴⁷*Ibid*, h. 93-94.

mengatakan bahwa kemiskinan timbul karena struktur, mereka itu sebenarnya bukan orang-orang miskin, tetapi dibuat miskin oleh sesuatu struktur⁴⁸.

Dari penjelasan diatas dapat kita menarik kesimpulan bahwa pengaruh atau hubungan kemiskinan terhadap terjadinya aksi premanisme ialah karena terjadinya ketidakadilan sosial,

Masyarakat Miskin Selalu Sarat Dengan Kriminalitas, Kriminalitas memang tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan. bahwa kemiskinan dan kriminalitas merupakan mata rantai lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua sejoli sehidup semati. Kriminalitas adalah anak kandung yang dilahirkannya. Dan ketimpangan serta kecemburuan sosial merupakan dampak yang ditimbulkannya. Selama masalah kemiskinan belum terentaskan, maka selama itu pula penjahat-penjahat akan tetap berkecimpung di tengah masyarakat⁴⁹.

Masalah utama mengapa kemiskinan masih menjadi momok di tengah negeri ini adalah memang harus diakui peruntukan modal bagi masyarakat miskin memang sangat terbatas. Selain itu pula bersamaan dengan masalah tersebut, usaha kecil dan menengah yang dikhususkan bagi masyarakat miskin juga mendatangkan problematika tersendiri.

Mengacu kepada teori hierarki kebutuhan milik Abraham Maslow, maka

⁴⁸*Ibid*, h. 95/92.

⁴⁹<http://indonesiancommunity.multiply.com/journal/item/970>

kebutuhan fisiologis (pangan, sandang, dan papan) merupakan kebutuhan dasariah yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Ketika kebutuhan dasariah belum dapat dipenuhi, maka kebutuhan yang hierarkinya lebih tinggi seperti keamanan, sosial, ego, dan aktualisasi diri tidak akan teraktifkan. Ketika akses untuk memenuhi kebutuhan dasariah ini sulit untuk ditembus, maka yang bersangkutan akan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkannya, termasuk dengan cara-cara yang tidak lazim seperti melakukan pelbagai tindak kejahatan. Dengan kata lain, selama kemiskinan belum terentaskan, maka angka kriminalitas tetap akan menjulang tinggi.

Hubungan kemiskinan dengan tindak kejahatan pencurian dapat dikatakan sangat erat, dimana kondisi hidup miskin cenderung membuat orang lebih berani melakukan tindak kejahatan karena hal itu terdorong dari keadaan hidupnya yang serba kekurangan sehingga mereka tidak berfikir panjang sebelum melakukan suatu perbuatan⁵⁰.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidisiplin, tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga terkait masalah sosial, budaya, politik dan lain-lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia, tahun 2010, tercatat 13,33 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun 2009 yang angkanya mencapai 14,15 persen.

⁵⁰<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-mariadwim9-336>

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang⁵¹.



⁵¹<http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-tahun-2010-berkurang/>

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Maret 2009-2010

Tabel I

N O	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin					
		Kota		Desa		K+D	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	NAD	182,19	173,37	710,68	688,48	892,87	861,85
2	Sumatra Utara	688,04	689,00	811,64	801,89	1 499,68	1 490,89
3	Sumatra Barat	115,78	106,18	313,48	323,84	429,25	430,02
4	Riau	225,60	208,92	301,89	291,34	527,49	500,26
5	Jambi	117,29	110,82	132,41	130,79	249,69	241,61
6	Sumatra Selatan	470,03	471,22	697,85	654,50	1 167,87	1 125,73
7	Bengkulu	117,60	117,21	206,53	207,72	324,13	324,93
8	Lampung	349,31	301,73	1 208,97	1 178,20	1 558,28	1 479,93
9	Bangka Belitung	28,78	21,85	47,85	45,90	76,63	67,75
10	Kepulauan Riau	62,58	67,08	65,63	62,59	128,21	129,66
11	DKI Jakarta	323,17	312,18	--	--	323,17	312,18
12	Jawa Barat	2 531,37	2 350,53	2 452,20	2 423,19	4 983,57	4 773,72
13	Jawa Tengah	2 420,94	2 258,94	3 304,75	3 110,22	5 725,69	5 369,16
14	DI Yogyakarta	311,47	308,36	274,31	268,94	585,78	577,30
15	Jawa Timur	2 148,51	1 873,55	3 874,07	3 655,76	6 022,59	5 529,30
16	Banten	348,74	318,29	439,33	439,87	788,07	758,16
17	Bali	92,06	83,62	89,66	91,31	181,72	174,93
18	NTB	557,54	552,62	493,41	456,74	1 050,95	1 009,35
19	NTT	109,41	107,38	903,74	906,71	1 013,15	1 014,09

20	Kalimantan Barat	93,98	83,43	340,79	345,32	434,77	428,76
21	Kalimantan Tengah	35,78	33,23	130,08	130,99	165,85	164,22
22	Kalimantan selatan	68,76	65,76	107,21	116,20	175,98	181,96
23	Kalimantan Timur	77,06	79,24	162,16	163,76	239,22	243,00
24	Sulawesi Utara	79,25	76,38	140,31	130,35	219,57	206,72
25	Sulawesi Tengah	54,67	54,22	435,17	420,77	489,84	474,99
26	Sulawesi Selatan	124,50	119,18	839,06	794,25	963,57	913,43
27	Sulawesi Tenggara	26,19	22,18	408,15	378,52	434,34	400,70
28	Sulawesi Barat	43,51	33,73	114,72	107,61	158,23	141,33
29	Gorontalo	22,19	17,84	202,43	192,05	224,62	209,89
30	Maluku	38,77	36,35	341,24	342,28	380,01	378,63
31	Maluku Utara	8,72	7,64	89,27	83,44	91,07	98,00
32	Papua Barat	8,55	9,59	248,29	246,66	256,84	256,25
33	Papua	28,19	26,18	732,16	735,44	760,35	761,62
Indonesia		11 910,53	11 097,77	20 619,44	19 925,62	32 529,97	31 023,39

Tabel II

No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Kota		Desa		K+D	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	NAD	15,44	14,65	24,37	23,54	21,80	20,98
2	Sumatra Utara	11,45	11,34	11,56	11,29	11,51	11,31
3	Sumatra Barat	7,50	6,84	10,60	10,88	9,54	9,50
4	Riau	8,04	7,17	10,93	10,15	9,48	8,65

5	Jambi	12,71	11,80	6,88	6,67	8,77	8,34
6	Sumatra Selatan	16,93	16,73	15,87	14,67	16,28	15,47
7	Bengkulu	19,16	18,75	18,28	18,05	18,59	18,30
8	Lampung	16,78	14,30	21,49	20,65	20,22	18,94
9	Bangka Belitung	5,86	4,39	8,93	8,45	7,46	6,51
10	Kepulauan Riau	7,63	7,87	8,98	8,24	8,27	8,05
11	DKI Jakarta	3,62	3,48	--	--	3,62	3,48
12	Jawa Barat	10,33	9,43	14,28	13,88	11,96	11,27
13	Jawa Tengah	15,41	14,33	19,89	18,66	17,72	16,56
14	DI Yogyakarta	14,25	13,98	22,60	21,95	17,23	16,83
15	Jawa Timur	12,17	10,58	21,00	19,74	16,68	15,26
16	Banten	5,62	4,99	10,70	10,44	7,64	7,16
17	Bali	4,50	4,04	5,98	6,02	5,13	4,88
18	NTB	28,84	28,16	18,40	16,78	22,78	21,55
19	NTT	14,01	13,57	25,35	25,10	23,31	23,03
20	Kalimantan Barat	7,23	6,31	10,09	10,06	9,30	9,02
21	Kalimantan Tengah	4,45	4,03	8,34	8,19	7,02	6,77
22	Kalimantan selatan	4,82	4,54	5,33	5,69	5,12	5,21
23	Kalimantan Timur	4,00	4,02	13,86	13,66	7,73	7,66
24	Sulawesi Utara	8,14	7,75	11,05	10,14	9,79	9,10
25	Sulawesi Tengah	10,09	9,82	21,35	20,26	18,98	18,07
26	Sulawesi Selatan	4,94	4,70	15,81	14,88	12,31	11,60
27	Sulawesi Tenggara	4,96	4,10	23,11	20,92	18,93	17,05
28	Sulawesi Barat	12,59	9,70	16,65	15,52	15,29	13,58

29	Gorontalo	7,89	6,29	32,82	30,89	25,01	23,19
30	Maluku	11,03	10,20	34,30	33,94	28,23	27,74
31	Maluku Utara	3,10	2,66	13,42	12,28	10,36	9,42
32	Papua Barat	5,22	5,73	44,71	43,48	35,71	34,88
33	Papua	6,10	5,55	46,81	46,02	37,53	36,80
Indonesia		10,72	9,87	17,35	16,56	14,15	13,33

2. Pengaruh Kultur/ budaya Terhadap Terjadinya Aksi Premanisme

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengertian kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Budaya ialah hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Dari pengertian ini dapat kita katakan bahwa premanisme juga termasuk budaya, karena premanisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang artinya premanisme ini hasil karya dan cipta manusia.

Premanisme sebagai terminologi yang dipilih media ini dimaksudkan untuk mengkondisikan sebuah perilaku yang telah menjadi kebenaran dan pandangan hidup yang dianut beberapa anggota masyarakat yang oportunis (mencari kesempatan).

Definisi sederhana tentang preman yang telah dijelaskan sebelumnya memang hanya akan memunculkan interpretasi yang abstrak dan sulit dibatasi. Tetapi pada praktiknya penyakit masyarakat ini dapat dengan mudah kita temui dalam setiap jaringan sosial masyarakat.

Tindakan preman sebenarnya merupakan wujud sikap merendahkan orang lain, malas, menyalahkan keadaan tak punya keahlian dipadu dengan keinginan cepat kaya dan mau enak saja. Orang seperti ini banyak kita temui di jalanan, parkir terminal atau daerah/instansi tertentu. Tameng yang biasanya mereka bawa yakni embel-embel keamanan dan ketertiban, yang sebenarnya adalah sebuah ironi. Sikap sok jago, mereka tampilkan dalam bentuk gertakan atau omelan bahkan tidak jarang berakhir pada kekerasan fisik. Akibat yang akan dihadapi jika sikap yang kita berikan tidak bekenan dengan keinginan mereka.

Sepak terjang preman-preman ini, dari kelas teri sampai yang sudah kakap tentu merupakan sesuatu yang sangat meresahkan masyarakat. Namun keresahan yang tidak bisa begitu saja mudah tersingkirkan dari halaman rumah kita.

Mencermati premanisme sebagai perilaku manusia tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural dan nilai-nilai sosial maupun moral yang dianut dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang dihadapinya.

Ada beberapa faktor penyebab yang menurut penulis memiliki relevansi dengan kultur bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung lebih menganggap standar seorang ksatria adalah yang kuat secara fisik, bertenaga kuat dan disegani karena kegarangan. Kejantanan, imej yang diagungkan dalam sistem patriarki (pemimpin) berkembang ke arah yang salah. Sementara faktor kematangan berpikir, intelektualitas dan prestasi nonfisik kurang dihargai. Pandangan ini akhirnya menciptakan pembenaran mental bahwa kekerasan dan mengintimidasi manusia lain adalah sesuatu yang wajar dan natural.

Selain itu, beberapa kelompok masyarakat masih mewarisi ciri masyarakat feodal (penguasa wilayah) yang memilih membutuhkan seorang "jagoan kampung" daripada mematuhi dan mempercayai peraturan. Hal ini memberi ruang bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin atau pengayom nonformal. Dan untuk jasanya, memberi upeti dianggap sebagai sesuatu yang wajar sehingga menjadikan preman betah dan menikmati kebodohnya⁵².

Faktor-faktor terjadinya premanisme atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat bawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya

⁵²http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28281&Itemid=62

keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu

1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

2. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang atau kejahatan. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Misalnya, seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan setelah melihat tayangan rekonstruksi cara melakukan kejahatan atau membaca artikel yang memuat tentang tindakan kriminal. Demikian halnya karir penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Hal itu juga terjadi pada penjahat berdasi putih (white collar crime) yakni para koruptor kelas kakap yang merugikan uang negara bermilyar- milyar. Berawal dari

kecurangan-kecurangan kecil semasa bekerja di kantor/mengelola uang negara, lama kelamaan makin berani dan menggunakan berbagai strategi yang sangat rapi dan tidak mengundang kecurigaan karena tertutup oleh penampilan sesaat.

3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Misalnya jika setiap penguasa terhadap rakyat makin menindas maka lama-kelamaan rakyat akan berani memberontak untuk melawan kesewenangan tersebut. Pemberontakan bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup dengan melakukan penipuan-penipuan/pemalsuan data agar dapat mencapai tujuannya meskipun dengan cara yang tidak benar. Penarikan pajak yang tinggi akan memunculkan keinginan memalsukan data, sehingga nilai pajak yang dikenakan menjadi rendah. Seseorang mencuri arus listrik untuk menghindari beban pajak listrik yang tinggi. Hal ini merupakan bentuk pemberontakan/perlawanan yang tersembunyi.

4. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.

5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang.

Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang) menyebabkan anak secara tidak sengaja menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut sesuatu yang wajar. Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang, sehingga terjadi proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan menyimpang pada diri anak dan anak menganggap perilaku menyimpang merupakan sesuatu yang wajar/biasa dan boleh dilakukan.

Bentuk-Bentuk Perilaku premanisme atau Menyimpang

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut. Bentuk-bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir.

2. Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bobot penyimpangan negatif didasarkan pada

kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat pada umumnya dinilai lebih berat dari pada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:

1. Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Seseorang yang melakukan penyimpangan primer masih diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang tersebut. Misalnya, siswa yang terlambat, pengemudi yang sesekali melanggar peraturan lalu lintas, dan orang yang terlambat membayar pajak.

2. Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, serta seseorang yang melakukan tindakan pemerkosaan. Tindakan penyimpangan tersebut cukup meresahkan masyarakat dan mereka biasanya di cap masyarakat sebagai “pencuri”, “pemabuk”, “penodong dan “pemerkos”. Julukan itu makin melekat pada si pelaku setelah ia ditangkap polisi dan diganjar dengan hukuman⁵³.

⁵³http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang#Penyebab_Terjadinya_Perilaku_Menyimpang

B. Langkah-Langkah dalam Pemberantasan Tindak Premanisme

Ada sebuah hadits yang sangat masyhur terkait dengan kewajiban nahi munkar. Hadits tersebut shahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi pun memasukkannya sebagai salah satu dari 40 hadits dalam Arba'in beliau. Berbagai artikel dan dalam banyak bahasan selalu hadits ini diartikan nyaris sama.

Hadits dimaksud adalah seperti di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -
رواه مسلم

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallôhu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa diantaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tak sanggup, maka dengan lidahnya. Dan jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman." ~ H.R. Muslim

Tugas semua manusia, warga negara. Aparat sebagai instrumen negara yang resmi untuk menjamin ketenteraman diberikan otoritas bagi penegakannya. Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap dalam prosedural hukum dan perundang-undangan yang berlaku⁵⁴.

⁵⁴http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28281&Itemid=62

Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum, Indonesia mengutamakan penyelesaian masalah sesuai peraturan dengan memenuhi asas pada keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Visi kepolisian melakukan operasi preman sampai ke akar-akarnya sebagai langkah awal mewujudkan reformasi di tubuh lembaga tersebut memang dapat memberi sedikit rasa lega di benak masyarakat Namun yang harus kita pikirkan bersama, bukan hanya polisi, premanisme tidak akan hilang hanya dengan berpaku pada razia.

Sebab ini bisa saja hanya menjadi siklus yang terus-menerus berulang, yang suatu saat ciut namun menjamur lagi mengganggu masyarakat dan kembali ditangani aparat. Operasi premanisme yang ditegakkan kepolisian harus didukung masyarakat sepenuhnya. Tidak ada pembelaan untuk tindakan premanisme apalagi pembenaran untuk kondisi ekonomi-sosial.

Keterpurukan berbagi sendi ibu pertiwi membutuhkan kerja keras dan semangat putra-putrinya. mental jagoan dan pemalas harus kita singkirkan dari budaya kita sebab orang-orang seperti ini hanya akan menjadi beban bangsa, parasit sosial yang menghinggapi tubuh masyarakat dan negara.

Dalam penanggulangan mengenai kejahatan premanisme ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu, pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan kemasyarakatan.

1. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial berbeda dengan pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional dan atau pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, paling tidak dilihat dari beberapa ciri yaitu :

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial tak terelakan lagi memusatkan perhatian utama pada remaja (usia mudah), termasuk anak-anak, sejak mereka secara prinsip dianggap sebagai kelompok penerima sosialisasi. Sebagian besar pelanggar hukum mulai melakukan pelanggaran pada waktu muda, dengan demikian pencegahan yang baik adalah harus dimulai sejak dini untuk memperoleh hasil yang baik⁵⁵.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan ini, juga memusatkan perhatian-perhatian pada susunan organisasi, institusi, struktur dan kultural di masyarakat, dimana dapat memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan sosialisasi bagi remaja sehingga mereka akan mempunyai resiko yang besar untuk menjadi pelanggar hukum di kemudian hari. Dalam hal yang sama strategi berdasarkan kepada ketenaga kerjaan dan lingkungan pergaulan akan menjadi lebih relevan bagi anak muda daripada anak-anak kecil, yang mana bagi mereka (anak-anak kecil), sekolah dan keluarga akan merupakan daerah intervensi yang paling penting.

2. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional

Teori-teori situasional lebih berguna untuk menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-

⁵⁵Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham, Op. Cit.* h. 84.

tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan. Pada umumnya situasi yang memberi kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisi kejahatan-kejahatan. Makanya dalam pendekatan situasional harus meningkatkan kewaspadaan, dan memperkokoh sasaran kejahatan atau sering juga disebut dengan *physican plenning*. Model ini diketengahkan berdasarkan faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Dengan memperbaiki desain lingkungan fisik dan persoalan ekonomi Akan dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan⁵⁶.

3. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan.

Anak mudah yang bermasalah tidaklah selalu harus bersifat antisosial, merusak, dan kejam karena keturunan, tetapi mereka adalah anak-anak mudah yang mempunyai keinginan dan aspirasi seperti anak-anak muda lainnya. Lebih jauh lagi, anak-anak nakal dan kelompok penjahat tidak menganggap mereka sendiri sebagai masalah dan tidak berusaha mencari perawatan, karena lingkungannya yaitu tempat tinggal, perilaku, dan norma yang ada telah membentuk jiwa mereka yang tumbuh disana. Jawaban dari kenakalan dan kejahatan anak-anak muda bersandar kepada lingkungan dan institusi yang ada pada masyarakat tersebut.

Untuk mencegah kenakalan anak-anak mudah ini harus melalui pendekatan kemasyarakatan yaitu dengan melakukan usaha-usaha pendekatan rasional, persuasif, dan proses penyadaran hukum⁵⁷, dan juga melalui pendekatan-pendekatan keagamaan

⁵⁶*Ibid*, h. 84-85.

⁵⁷*Ibid*, h. 86.

atau spiritual. Sehingga anggota masyarakat tidak melakukan kejahatan bukan karena takut mendapatkan hukuman berat, tetapi atas kesadarannya sendiri. Ia tahu bahwa melakukan kejahatan berarti mengganggu orang lain dan dari segi agama maupun hati nuraninya adalah tidak terpuji⁵⁸.



⁵⁸Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Op. Cit, h. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus perhatian atas dasar penulisan dalam skripsi ini maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme itu sangat besar. Penyebab utama seseorang menjadi seorang preman adalah faktor ekonomi dan sosial, terutama berkaitan upaya mereka bertahan hidup. Masyarakat Miskin Selalu Sarat Dengan Kriminalitas, tindakan premanisme memang tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan. bahwa kemiskinan dan premanisme atau kriminalitas merupakan mata rantai lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Dan juga terjadinya tindakan premanisme di pengaruhi oleh lingkungan atau budaya, yaitu Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir). Dan Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.
2. Langkah-langkah dalam pemberantasan tindak premanisme solusi yang paling tepat adalah dengan membuat sebuah stabilitas ekonomi yang kuat, sehingga Negara bisa menjamin kemakmuran rakyatnya, di samping penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana

dalam menangani kasus ini. Ada beberapa pendekatan yang perlu di tempuh dalam pencegahan premanisme, yaitu

1. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial.
2. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional.
3. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan.

B. Saran-saran

1. Ketidakadilan, Tentu saja ada efek domino yang akan ditanggung lingkungan padat karya. Kini satu per satu warganya akan berubah status menjadi "pengangguran terbuka" dan mengurangi pendapatan tetap dapur keluarga yang semakin tidak berdaya, menghidupi perut manusia yang makin meronta. Di tengah peliknya hidup wong cilik bertahan hidup, kita bisa belajar dari salah satu contoh bagaimana solidaritas sosial diwujudkan dengan kesediaan hidup berbagi di tengah kesulitan hidup.
2. Jimpitan beras atau jimpitan uang adalah tindakan sederhana namun mulia. Beras adalah aset ekonomi milik seseorang untuk menghidupi perut anggota keluarga dari naluri manusia yang butuh makan setiap hari. Dengan jimpitan beras (diambil dengan segenggam tangan) masih rela dibagikan, supaya orang lain tidak kelaparan dan tetangga akan mendapat makan yang dibutuhkan. Ini adalah simbol kemurahan hati. Jimpitan beras akan diambil setiap hari, dan dikumpulkan dalam lumbung, serta siap dibagikan seminggu sekali.

3. Reformasi Hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*).



DAFTAR PUSTA

Alcaff, Muhammad, <http://panoramaislam.wordpress.com/2009/03/29/premanisme-atas-nama-agama/>, Februari 22, 2010.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I; jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum dan Ham*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.

Danim, Sudarman, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lintas Media, 2002.

Jurdi, yarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khilafah Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001.

Modul, *Advokasi anggaran pro Rakyat Miskin Berbasis Ormas Islam*, Cet. I; Jakarta: Seknas Fitra & The Asia Foundation.

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

Partanto, Pius A, Al barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, edisi pertama, Yogyakarta, Arkola, 1994.

Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Cet. I; Jakarta: Mizan, 2006.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif Ceramah-Ceramah di Kampus*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1986.

Samin, Sabri, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Simanjuntak, Maruli C.C., *Preman-Preman Jakarta*, Cet. I; Jakarta: Pensil-324, 2007.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, Cet. 8; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sohari, at Syafaat, Muslih, Sahrani, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Yulianta, Krinsa, [http:// Realita Sosial. Lembar Lawas.com/2008/11/26/ Menggugat \(definisi\) Preman](http://Realita.Sosial.Lembar.Lawas.com/2008/11/26/Menggugat%20definisi%20Preman), Februari 22, 2010.

<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-mariadwim9-336>

<http://hukum.kompasiana.com/2010/05/20/premanisme-subur-karena-terpupuk/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang#Penyebab_Terjadinya_Perilaku_Menyimpang

<http://indonesiancommunity.multiply.com/journal/item/970>

http://kendariexpress.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=40966>

<http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>

<http://susub.blogspot.com/2009/02/vrijman-bukan-preman.html>

http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7671:arti-penyiksaan-dan-penganiayaan&catid=52:konsultasi-ham&Itemid=77

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=117766>

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28281&Itemid=62

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28281&Itemid=62

<http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-tahun-2010-berkurang/>

webmaster@mediaindonesia.co.id